

KESEJAHTERAAN RAKYAT MENINGKAT, JEPARA RAIH PENGHARGAAN KEMENKEU



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2022/06/20220613_BETANEWS_PJ-Bupati-Jepara-ke-Puskesmas-1.jpg?resize=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, JEPARA – Kabupaten Jepara mendapat penghargaan dan apresiasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI). Jepara memperoleh alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp24,4 miliar.

Penghargaan ini disampaikan saat Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengikuti rapat koordinasi nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tahun 2022, yang berlangsung di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023.

“Alhamdulillah Kabupaten Jepara kembali mendapat apresiasi dari Kemenkeu atas capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara Ronji.

Ada empat kategori yang berhasil diraih Jepara, yaitu kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kinerja penurunan stunting, kinerja penggunaan produk dalam negeri dan kinerja percepatan belanja daerah.

“Jepara mendapat apresiasi dan intensif semua kategori tersebut,” kata Ronji.

Atas capaiannya itu, Kemenkeu memberikan alokasi dana fiskal Rp6,3 miliar (penanganan kemiskinan), Rp6,4 miliar (penurunan stunting), Rp5,7 miliar (penggunaan produk dalam negeri), dan Rp5,9 miliar (percepatan belanja daerah).

“Total alokasi yang kita dapatkan senilai Rp24,4 miliar,” kata dia.

Di tingkat Jawa Tengah hanya ada 3 kabupaten/kota yang mendapatkan insentif untuk 4 kategori yaitu Jepara, Sragen dan Grobogan. Sedangkan 23 kabupaten/kota lain ada yang mendapatkan dua atau tiga kategori.

Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan, prestasi ini adalah prestasi seluruh elemen masyarakat Jepara termasuk Forkopimda yang telah bersama-sama secara sinergis membangun Jepara.

“Ini adalah buah kerja keras kita bersama. Semangat gotong royong dan bahu membahu dengan tekad kuat mensejahterakan masyarakat,” kata dia.

Dana insentif fiskal tersebut nantinya akan digunakan untuk menuntaskan kemiskinan, pengentasan stunting dan pengembangan produk – produk usaha kecil yang ada di Jepara. Sebelumnya Jepara juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang kinerja pengendalian inflasinya mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat hingga mendapatkan hadiah Rp9,6 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2023/10/kesejahteraan-rakyat-meningkat-jepara-raih-penghargaan-kemenkeu.html>, “Kesejahteraan Rakyat Meningkat, Jepara Raih Penghargaan Kemenkeu”, tanggal 3 Oktober 2023.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0710378121/ini-lho-prestasi-jepara-dapat-insentif-rp-244-miliar-untuk-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat>, “Ini Lho Prestasi Jepara : Dapat Insentif Rp 24,4 Miliar untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, tanggal 3 Oktober 2023.

Catatan :

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.¹

¹ <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pmda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.²
- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.³
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.⁴
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
 3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi